

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 22/TI.01.00/K.KR/07/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
  - b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya pemutakhiran Klasifikasi Daftar Informasi Publik;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tentang tentang penetapan Daftar Informasi Publik.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- Kedua : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
  - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
  - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- Ketiga : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan data yang sudah terpublish di website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sejak **Januari s.d Juni 2026** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 01 Juli 2026

KETUA,



ZULHADRI PUTRA, ST

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 22/TI.01.00/K.KR/07/2026  
Tanggal : 01 Juli 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

| No.                  | Ringkasan Informasi                                                                                                                                                                                                                  | Pejabat/ Unit yang Menguasai Informasi           | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi                              | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                             |                           | Softcopy                       | Hardcopy |                          |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                | 4                                                                           | 5                         | 6                              | 7        | 8                        |
| A. INFORMASI BERKALA |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                             |                           |                                |          |                          |
| 1.                   | SK Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026                                                                                                                                                                                       | Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                            | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 2.                   | SK Pembentukan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                                               | Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                            | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 3.                   | Ringkasan Layanan Informasi Publik tahun 2025                                                                                                                                                                                        | Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                            | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 4.                   | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025                                                                                                                                                                                | Bagian Administrasi                              | Kepala Bagian Administrasi                                                  | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 5.                   | Laporan Keuangan Audited tahun 2025                                                                                                                                                                                                  | Bagian Administrasi                              | Kepala Bagian Administrasi                                                  | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| 6.                   | Laporan Konsolidasi Demokrasi tahun 2026                                                                                                                                                                                             | Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa           | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| 7.                   | Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 1/Ti.02/K.Kr/01/2026 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 | Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                            | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 8.                   | Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 493/PR.02/KR/05/2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum                                                                             | Bagian Administrasi                              | Kepala Bagian Administrasi                                                  | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |

| No.                             | Ringkasan Informasi                                                                                                                                                                                                                                        | Pejabat/ Unit yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                |                           | Softcopy                       | Hardcopy |                          |
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                      | 4                                              | 5                         | 6                              | 7        | 8                        |
|                                 | Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                |                           |                                |          |                          |
| 9.                              | Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026                                                                                                                                                                           | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| 10.                             | Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026                                                                                                                                                                   | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| 11.                             | Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026                                                                                                                                              | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| 12.                             | Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026                                                                                                           | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| 13.                             | Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025                                                                                                                                                                                        | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2025                      | √                              |          | Sesuai Retensi Arsip     |
| <b>B. INFORMASI SERTA MERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                |                           |                                |          |                          |
| 1.                              | Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 3 tahun 2026 Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 2.                              | Surat Ketua Bawaslu RI Nomor B-479/KP.08.01/SJ/02/2026 Pelaporan Kinerja Harian Pegawai yang Melaksanakan Work From Anywhere (WFA)                                                                                                                         | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 3.                              | Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadan                                                                                                                                                                                       | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |

| No. | Ringkasan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pejabat/ Unit yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                |                           | Softcopy                       | Hardcopy |                          |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                      | 4                                              | 5                         | 6                              | 7        | 8                        |
|     | 1447 Hijriah Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                |                           |                                |          |                          |
| 4.  | Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Pada Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) Dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 5.  | Surat Edaran Nomor 2 tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum                                                                                                                                                                                                                                     | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 6.  | Surat Edaran Sekjen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Deklarasi Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 7.  | Surat Edaran Nomor 8 tahun 2026 tentang Jam Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 8.  | Surat Edaran Nomor 10 tahun 2026 tentang Pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di                                                                                                                                                                                                                                               | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                     | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |

| No.                   | Ringkasan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pejabat/ Unit yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi   | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                  |                           | Softcopy                       | Hardcopy |                          |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                      | 4                                                | 5                         | 6                              | 7        | 8                        |
|                       | lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                  |                           |                                |          |                          |
| 9.                    | Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1634/KP.10/SJ/05/2026 tentang Petunjuk Teknis Tunjangan kinerja pegawai Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                       | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 10.                   | Surat Edaran Nomor 17 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/ Kota                                                                            | Bagian Administrasi                    | Kepala Bagian Administrasi                       | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| <b>C. SETIAP SAAT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                  |                           |                                |          |                          |
| 1.                    | Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan STAIN Sultan Aburrahman Kepulauan Riau                                                                                                                                                                                                                     | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 2.                    | Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan STAIN Sultan Aburrahman Kepulauan Riau                                                                                                                                                                                                           | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 3.                    | Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026                                                                                                                                                                                                     | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 4.                    | Perjanjian Kerasama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi                                                                                                                                                                                                                                               | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |

| No. | Ringkasan Informasi                                                                                | Pejabat/ Unit yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi   | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|     |                                                                                                    |                                        |                                                  |                           | Softcopy                       | Hardcopy |                          |
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                      | 4                                                | 5                         | 6                              | 7        | 8                        |
|     | Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026                                                       |                                        |                                                  |                           |                                |          |                          |
| 5.  | Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji   | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 6.  | Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kepri dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji                 | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |
| 7.  | Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Inspirasi Rakyat Kepri (Ulasan) | Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | 2026                      | √                              | √        | Sesuai Retensi Arsip     |

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 01 Juli 2026

KETUA,



ZULHADRI PUTRA, ST